

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Pengaruh Pengelolaan Dana KUR Berbasis Syariah di Bank terhadap Kemandirian Ekonomi UMKM di Pedesaan Aceh Timur

Abdul Aziz ^{1*}, Ismail ², Muhammad Jamil ³, Muliana ⁴

^{1*} Prodi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Indonesia.

² Prodi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Indonesia

³ Prodi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Indonesia.

⁴ Prodi Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia.

*Correspondence email:
emailcorresponding@ypmma.org

Received: 2 June 2026
Accepted: 20 June 2026
Published: 30 June 2026

Daftar lengkap informasi penulis
tersedia di akhir artikel.

Abstract

The management of People's Business Credit (KUR) funds based on Islamic economic principles represents a strategic instrument for strengthening the economic independence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in rural areas of East Aceh. This study aims to analyze the effect of Sharia-based KUR fund management on MSME economic independence and identify the mechanisms and challenges associated with its implementation. The study employs a mixed-methods approach, integrating quantitative and qualitative analyses. Quantitative data were collected through a survey of 114 MSME owners who received KUR financing, while qualitative data were obtained through interviews with banking institutions and MSME operators. The findings indicate that Sharia-based KUR fund management has a positive and statistically significant effect on MSME economic independence, with a regression coefficient of 0.242, a t-value of 8.634, and a significance level of 0.000. Qualitative findings suggest that financing effectiveness is supported by business eligibility verification, compliance with Sharia principles, monitoring, and business assistance. However, uncertainty regarding field survey schedules, limited Islamic financial literacy, and inadequate managerial capacity remain significant challenges. This study recommends strengthening financing governance, service transparency, financial literacy, and continuous business assistance to establish an inclusive and sustainable MSME financing ecosystem.

Keywords: Management; KUR; MSMEs; Economic Independence.

Abstrak

Pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis prinsip ekonomi syariah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah pedesaan Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan dana KUR berbasis syariah terhadap kemandirian ekonomi UMKM serta mengidentifikasi mekanisme dan kendala implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 114 pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak perbankan dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana KUR berbasis syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM, dengan koefisien regresi sebesar 0,242, nilai t sebesar 8,634, dan signifikansi 0,000. Temuan kualitatif mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan didukung oleh verifikasi kelayakan usaha, kepatuhan prinsip syariah, monitoring, dan pendampingan. Namun, ketidakpastian jadwal survei lapangan, keterbatasan literasi keuangan syariah, dan kapasitas manajerial masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pembiayaan, transparansi layanan, literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan guna mewujudkan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen; KUR; UMKM; Kemandirian Ekonomi.



1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di daerah pedesaan. Di Indonesia, UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Janah & Tampubolon, 2024). Namun demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan. Dalam konteks Aceh Timur, khususnya di daerah pedesaan, kendala modal tetap menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM (Nadia dkk., 2025). Pada tahun 2020, program Ultra Mikro (UMi) menargetkan 300.879 pelaku usaha dengan total alokasi pembiayaan sebesar Rp 722,1 miliar, dengan Aceh Timur menjadi kabupaten penerima terbesar, menerima Rp 71,15 miliar yang didistribusikan kepada 29.647 pelaku usaha (Safrina, 2023). Data ini menggarisbawahi urgensi peningkatan akses terhadap pembiayaan sektor mikro di wilayah tersebut. Pada tahun 2025, realisasi pembiayaan meningkat secara signifikan menjadi Rp 2,56 triliun, menjangkau 23.853 UMKM (Dewi Safitri, 2026). Di Aceh Timur, terdapat 5.891 UMKM di berbagai sektor dengan potensi signifikan untuk diperkuat melalui intervensi pembiayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan (dataumkm.aceh).

Pemerintah Indonesia telah memulai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai intervensi kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Alfian, Nurzaman, & Alfian, 2025). Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat Aceh, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan manajerial terhadap penyaluran dana KUR agar selaras dengan nilai-nilai Syariah. Hal ini sejalan dengan status khusus Aceh sebagai daerah yang secara formal menerapkan hukum Islam (Syariah) melalui peraturan Qanun, termasuk di sektor keuangan dan perbankan (Ratnawita dkk., 2023). Pengelolaan KUR berbasis Syariah tidak hanya mengubah instrumen keuangan dari sistem berbasis bunga konvensional menjadi mekanisme bebas riba; tetapi juga menekankan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemitraan (*musyarakah*), transparansi, dan tanggung jawab sosial (Azizi & Mugiyati, 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan KUR berbasis Syariah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan distribusi dana, yang berlandaskan landasan moral dan filosofis *maqāṣid al-sharī'ah* (Heriyanto & Taufiq, 2024; Khairunnisa et al., 2025).

Perencanaan dalam pengelolaan dana KUR berbasis Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat (*barakah*). Melalui prinsip-prinsip Syariah, distribusi dana menjadi lebih tepat sasaran dan etis. Di pedesaan Aceh Timur, perencanaan yang terstruktur dengan baik dapat mendorong kemandirian ekonomi UMKM meskipun terdapat keterbatasan infrastruktur dan literasi keuangan (Maknuni, J., & Husna, I. 2026).. Lebih lanjut, penerapan kontrak Syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menciptakan kerja sama yang adil antara bank dan pelaku UMKM, memungkinkan pertumbuhan pendapatan tanpa beban bunga. Studi ini bertujuan untuk meneliti kontribusi pengelolaan dana KUR berbasis Syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM (Fitriyanti & Wulandari, 2025). Aspek pengawasan dalam pengelolaan dana KUR berbasis Syariah memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, dan pemanfaatan dana yang efektif (Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. 2025). Di lembaga keuangan Islam, pengawasan dilakukan tidak hanya oleh manajemen internal bank tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan bahwa semua proses sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pengawasan dapat berupa pendampingan dan pendidikan bagi pelaku UMKM mengenai tata kelola bisnis, pembukuan dasar, dan perencanaan bisnis (Tijani dkk., 2020). Pengawasan yang efektif diyakini dapat mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi UMKM, karena tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberdayakan.

Pembiayaan KUR berbasis Syariah memainkan peran strategis dalam mempromosikan pertumbuhan dan kemandirian UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Akses terhadap modal melalui KUR memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk ekspansi bisnis dan keberlanjutan operasional (Cahyani & Mu'arrifin, 2024). Selain itu, karakteristik terstruktur dari pembiayaan Syariah mendorong peningkatan manajemen keuangan di kalangan pelaku bisnis, sehingga berdampak positif pada kinerja UMKM secara keseluruhan. Pembiayaan ini juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh bank semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk keuangan Syariah, memperkuat dukungan untuk pengembangan UMKM. Namun, tantangan tetap ada, termasuk pemahaman dan akses yang terbatas terhadap produk pembiayaan Syariah, yang dapat menghambat realisasi kemandirian ekonomi secara komprehensif di daerah pedesaan.

Mengingat realitas sosial dan kondisi lokal Aceh Timur yang bercirikan potensi signifikan di bidang pertanian, perkebunan, dan industri rumahan, namun dibatasi oleh keterbatasan modal dan bantuan manajerial, isu ini menjadi semakin relevan untuk diteliti. Di tengah upaya nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, implementasi pengelolaan dana KUR berbasis Syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis tetapi juga sebagai pendekatan etis dan kontekstual yang selaras dengan karakteristik masyarakat Aceh Timur. Studi ini berfokus pada dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, strategi pengelolaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUR) apa yang diterapkan oleh lembaga keuangan? Kedua, sejauh mana distribusi dana KUR memengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah?

2. Metode

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan explanatory sequential (Setiawan, A. 2025), yang diawali dengan analisis kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperdalam temuan kuantitatif. Penelitian berfokus pada pengelolaan dana KUR berbasis syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah serta pengaruhnya terhadap kemandirian ekonomi UMKM di wilayah perdesaan Aceh Timur.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah UMKM penerima KUR berbasis syariah di wilayah perdesaan Aceh Timur. Berdasarkan rumus Lemeshow, diperoleh ukuran sampel minimum sebesar 96,04, yang dibulatkan menjadi 97 responden. Untuk mengantisipasi data yang tidak lengkap, jumlah sampel ditingkatkan menjadi 114 UMKM. Responden dipilih menggunakan purposive sampling (Lenaini, I. 2021). dengan kriteria telah menerima KUR berbasis syariah sekurang-kurangnya satu tahun dan menjalankan usaha produktif yang masih aktif. Informan kualitatif terdiri atas petugas pembiayaan/KUR dari Bank Aceh Syariah dan BSI Cabang Aceh Timur serta pelaku UMKM.

2.3 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS melalui statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t (Purba, D. S. dkk. 2021). Pengaruh manajemen dana KUR berbasis syariah terhadap kemandirian ekonomi UMKM dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan variabel kontrol berupa durasi usaha (Z_1), jenis usaha (Z_2), dan tingkat pendidikan (Z_3). Data kualitatif dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana KUR berbasis syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi UMKM.

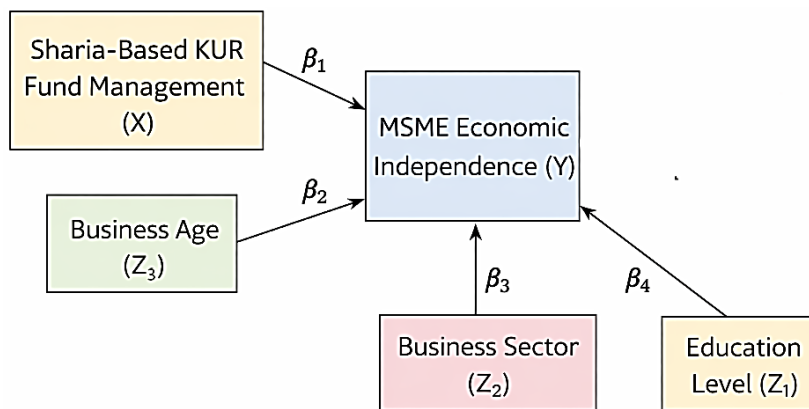
2.3.1 Model Regresi

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + \beta_3 Z_2 + \beta_4 Z_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kemandirian ekonomi UMKM; X = Manajemen dana KUR berbasis syariah; Z_1 = Durasi usaha; Z_2 = Jenis usaha; Z_3 = Tingkat pendidikan; α = Konstanta; β_1 – β_4 = Koefisien regresi; dan ε = error.



Gambar 1. Structural Diagram

3. Studi kasus/Hasil

3.1 Strategi Pengelolaan Dana KUR

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah, penyaluran KUR diarahkan pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas daerah, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan mikro. Dalam pelaksanaannya, Bank Aceh Syariah menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk penetapan margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga melakukan pengalokasian kuota berdasarkan wilayah serta memperkuat sosialisasi program KUR di berbagai wilayah Aceh Timur. Hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) "Menurut pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), "Proses penyaluran KUR dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi dan survei, persetujuan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor cabang BSI maupun layanan digital yang tersedia. Setelah pengajuan diterima, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan survei terhadap lokasi serta kondisi usaha calon penerima. Apabila usaha dinyatakan layak dan pembiayaan disetujui, nasabah melakukan penandatanganan akad sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dana KUR dicairkan melalui rekening BSI milik nasabah. Kami juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, kelayakan usaha, dan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan. Selain memberikan pembiayaan, BSI juga memberikan edukasi mengenai literasi keuangan dan pengelolaan usaha kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, penyaluran KUR tidak hanya berfokus pada pencairan dana, tetapi juga mencakup proses pemantauan dan pendampingan untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM." (R1)

Sedangkan pada Bank Aceh Syariah, hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa: "Proses penyaluran KUR dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan berkas, verifikasi dan analisis, penandatanganan akad, serta pencairan dana. Pada tahap awal, calon penerima harus melengkapi dokumen persyaratan, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, serta dokumen legalitas usaha berupa NIB atau SKU. Untuk plafon pembiayaan tertentu, nasabah juga perlu melengkapi NPWP. Setelah berkas diterima, petugas melakukan verifikasi dokumen dan survei terhadap lokasi serta kondisi usaha calon penerima. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan usaha untuk menentukan keputusan dan plafon pembiayaan. Apabila pembiayaan disetujui, nasabah menandatangani akad sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh proses selesai, dana pembiayaan dicairkan ke rekening nasabah dan penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah diajukan." (R2)

Sementara itu pihak UMKM tahapan survei usaha oleh pihak bank. Jadwal pelaksanaan survei terkadang belum dapat dipastikan, sehingga pelaku UMKM harus menunggu beberapa hari hingga petugas bank melakukan kunjungan lapangan. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat proses pencairan dana, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam waktu relatif cepat. Salah seorang informan menyampaikan: "KUR sangat membantu usaha kami, terutama untuk tambahan modal. Namun, proses pencairannya terkadang membutuhkan waktu cukup lama karena harus menunggu survei dari pihak bank. Kami tidak selalu mengetahui kapan petugas akan datang melakukan survei, sehingga terkadang harus menunggu beberapa hari sebelum proses dapat dilanjutkan." (UMKM-1)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan KUR berbasis syariah telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan verifikasi, survei, analisis kelayakan, akad, pencairan, serta pendampingan usaha. Program KUR dinilai membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal dan mendukung keberlanjutan usaha.

Namun, dari sisi penerima, lamanya dan ketidakpastian waktu pelaksanaan survei lapangan masih menjadi kendala yang dapat memperlambat proses pencairan dana. Dengan demikian, peningkatan efisiensi, transparansi jadwal survei, dan kepastian waktu layanan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR kepada UMKM.

3.2 Pengaruh Penyaluran Dana KUR terhadap Perkembangan UMKM

Tabel ini menggambarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan lama menjalankan usaha sebagai dasar untuk memahami kondisi sosial ekonomi pelaku UMKM penerima KUR berbasis syariah di Aceh Timur.

No .	Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	67	58,77
		Perempuan	47	41,23
2	Usia	20–30 tahun	19	16,67
		31–40 tahun	36	31,58
		41–50 tahun	34	29,82
		>50 tahun	25	21,93
3	Tingkat Pendidikan	SD/Sederajat	18	15,79
		SMP/Sederajat	27	23,68
		SMA/SMK/Sederajat	46	40,35
		Diploma (D3)	9	7,89
		Sarjana (S1)	14	12,28
4	Jenis Usaha	Perdagangan	38	33,33
		Industri Pengolahan/Manufaktur	21	18,42
		Pertanian/Perkebunan	24	21,05
		Peternakan/Perikanan	15	13,16
		Jasa	16	14,04
5	Lama Menjalankan Usaha	<3 tahun	22	19,3
		3–5 tahun	37	32,46
		6–10 tahun	34	29,82
		>10 tahun	21	18,42
		Total	114	100%

Sumber: Daprimmer, diolah (2026).

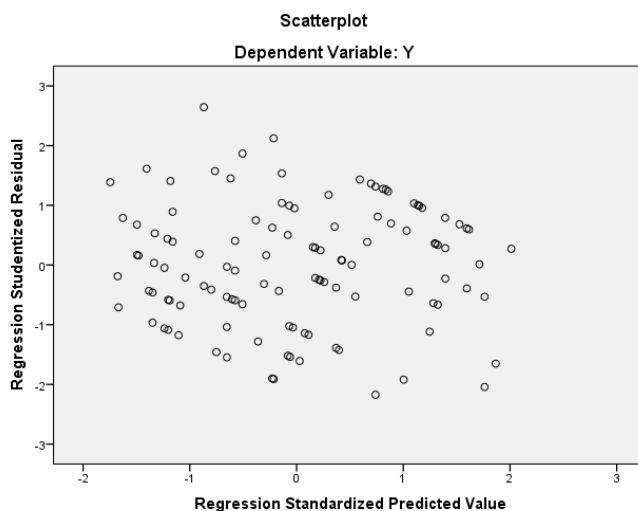
Berdasarkan data dari 114 responden, mayoritas pelaku UMKM penerima KUR berbasis syariah adalah laki-laki (58,77%), dengan dominasi responden pada kelompok usia produktif 31–50 tahun (61,40%). Tingkat pendidikan responden didominasi oleh SMA/SMK (40,35%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan menengah. Berdasarkan jenis usaha, sektor perdagangan merupakan kelompok terbesar (33,33%), diikuti oleh pertanian/perkebunan (21,05%). Dari sisi pengalaman usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama 3–10 tahun (62,28%), yang menunjukkan adanya pengalaman usaha yang relatif memadai dan keberlangsungan kegiatan usaha di kalangan penerima KUR.

Table : 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.99211027
Most Extreme Differences	Absolute	0.047
	Positive	0.047
	Negative	-0.036
Test Statistic		0.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Data di oleh: 2026

Uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov (K-S Test) terhadap residual tidak terstandarisasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, residual dalam model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Nilai K-S sebesar 0,047, dengan most extreme differences positif 0,047 dan negatif -0,036, menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi residual dari distribusi normal relatif kecil. Nilai rata-rata residual sebesar 0,000 juga menunjukkan tidak terdapat penyimpangan sistematis yang berarti. Terpenuhinya asumsi normalitas menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk pengujian uji t dan uji F, sehingga analisis pengaruh manajemen dana KUR berbasis syariah (X), durasi usaha (Z1), jenis usaha (Z2), dan tingkat pendidikan (Z3) terhadap kemandirian ekonomi UMKM dapat dilakukan secara inferensial.



Gambar: 2 scatterplot

Secara keseluruhan, scatterplot menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar yang diperlukan. Tidak terdapat indikasi kuat adanya heteroskedastisitas maupun hubungan nonlinier yang tidak terdeteksi. Meskipun terdapat beberapa titik yang relatif menyebar, titik-titik tersebut tidak menunjukkan pencilan ekstrem dan diperkirakan tidak memengaruhi hasil analisis secara signifikan.

Tabel:3 Coefficient of Determination Test

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.639 ^a	0.408	0.386	2.02833	1.895

a. Predictors: (Constant), Z3, X, Z1, Z2

b. Dependent Variable: Y

Dara diolah 2026

Hasil Model Summary menunjukkan nilai R sebesar 0,639, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dan cukup kuat antara manajemen dana KUR berbasis syariah (X), durasi usaha (Z1), jenis usaha (Z2), dan tingkat pendidikan (Z3) secara simultan dengan kemandirian ekonomi UMKM (Y). Nilai R Square sebesar 0,408 menunjukkan bahwa sebesar 40,8% variasi kemandirian ekonomi UMKM dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 59,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti akses pasar, inovasi produk, kemampuan manajerial, dan dukungan kelembagaan. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,386 menunjukkan bahwa model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang cukup setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,02833 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif terkendali. Adapun nilai Durbin-Watson sebesar 1,895, yang mendekati angka 2, menunjukkan tidak terdapat indikasi autokorelasi yang berarti. Dengan demikian, model regresi dinilai layak digunakan untuk menganalisis hubungan manajemen dana KUR berbasis syariah dengan kemandirian ekonomi UMKM.

Tabel: 4 Simultaneous Test (ANOVA / F-test)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	309.314	4	77.328	18.796	0.000 ^b
	Residual	448.441	109	4.114		
	Total	757.754	113			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z3, X, Z1, Z2

Hasil uji ANOVA (uji F) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 18,796 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dana KUR berbasis syariah (X), durasi usaha (Z1), jenis usaha (Z2), dan tingkat pendidikan (Z3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM (Y). Dengan demikian, model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nilai Sum of Squares Regression sebesar 309,314 menunjukkan variasi kemandirian ekonomi UMKM yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan Sum of Squares Residual sebesar 448,441 menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh pembiayaan, tetapi juga oleh berbagai faktor lainnya. Secara keseluruhan, hasil uji F menunjukkan bahwa model memiliki kelayakan statistik dalam menjelaskan hubungan antara manajemen dana KUR berbasis syariah dan kemandirian ekonomi UMKM di wilayah perdesaan Aceh Timur.

Tabel: 5 Partial Test (t-test / Coefficients)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.495	2.436		2.256	0.026		
1 X	0.242	0.028	0.647	8.634	0.000	0.967	1.035
Z1	-0.253	0.457	-0.116	-0.554	0.581	0.125	8.026
Z2	0.092	0.407	0.051	0.227	0.821	0.108	9.282
Z3	-0.046	0.611	-0.018	-0.076	0.940	0.096	10.378

a. Dependent Variable: Y

Data diolah 2026

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa manajemen dana KUR berbasis syariah (X) memiliki koefisien regresi sebesar 0,242, nilai t sebesar 8,634, dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM. Nilai Standardized Beta sebesar 0,647 menunjukkan bahwa variabel X memiliki kontribusi relatif paling besar dalam model. Sementara itu, durasi usaha (Z1) memiliki koefisien -0,253 dengan signifikansi 0,581, jenis usaha (Z2) memiliki koefisien 0,092 dengan signifikansi 0,821, dan tingkat pendidikan (Z3) memiliki koefisien -0,046 dengan signifikansi 0,940. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM dalam model penelitian ini.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa X memiliki VIF 1,035, sedangkan Z1, Z2, dan Z3 masing-masing sebesar 8,026; 9,282; dan 10,378. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi multikolinearitas pada variabel kontrol, terutama Z3, sehingga hasil pengaruh parsial variabel tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa manajemen dana KUR berbasis syariah merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM. Dengan demikian, H_1 diterima dan H_0 ditolak. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pembiayaan KUR yang efektif dalam mendukung kemandirian ekonomi UMKM di wilayah perdesaan Aceh Timur.

3.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana KUR berbasis syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi UMKM di wilayah perdesaan Aceh Timur. Hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,242, nilai t sebesar 8,634, dan signifikansi 0,000. Temuan kualitatif memperkuat hasil tersebut bahwa efektivitas KUR didukung oleh verifikasi kelayakan usaha, kepatuhan prinsip syariah, ketepatan penggunaan dana, monitoring, dan pendampingan. Namun, ketidakpastian waktu survei lapangan masih menjadi kendala dalam proses pencairan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa KUR dapat memperkuat akses modal, meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan keberlanjutan UMKM (Sholeha, A, dkk. 2025), (Ningrum, E. M., & Tambunan, K. 2025). Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa dampak pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, pendampingan, pengawasan, dan kesesuaian penggunaan dana, (Saniaturohmah, S, dkk. 2026). Dalam konteks pembiayaan syariah, prinsip kepatuhan, transparansi, dan kebermanfaatan ekonomi menjadi bagian penting dalam mendukung kemandirian UMKM, (Jaenab, J. dkk. 2025). Hasil penelitian menjadi tanda bahwa akses pembiayaan saja belum cukup untuk membangun kemandirian ekonomi UMKM. Kualitas tata kelola pembiayaan dan hubungan antara bank dengan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, KUR dapat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar fasilitas pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian UMKM perlu didukung oleh pengelolaan KUR yang terarah, selektif, transparan, dan berkelanjutan. Efektivitas pembiayaan menjadi lebih optimal apabila disertai pendampingan dan pemantauan usaha. Pengelolaan yang baik memungkinkan dana KUR digunakan sesuai kebutuhan produktif, mengurangi risiko penyalahgunaan pembiayaan, dan membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Sebaliknya, proses survei yang belum memiliki kepastian waktu dapat mengurangi efisiensi layanan dan menunda pemanfaatan modal.

Bank perlu meningkatkan efisiensi proses survei dan memberikan informasi jadwal layanan yang lebih transparan kepada calon penerima KUR. Pendampingan, literasi keuangan, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana juga perlu diperkuat. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, hasil ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi dan kebijakan pembiayaan UMKM berbasis syariah yang lebih mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perdesaan Aceh Timur. Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,242, nilai t sebesar 8,634, dan tingkat signifikansi 0,000, yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kualitas pengelolaan pembiayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil kualitatif yang menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran dana yang disalurkan, melainkan juga oleh ketepatan verifikasi kelayakan usaha, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kesesuaian pemanfaatan dana, pengawasan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa KUR berbasis syariah memiliki dimensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan fungsi intermediasi keuangan dengan penguatan kapasitas produktif UMKM. Kualitas tata kelola pembiayaan, transparansi layanan, dan relasi kelembagaan antara perbankan dan pelaku usaha menjadi determinan penting dalam memastikan pembiayaan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan kemandirian ekonomi. Meskipun demikian, ketidakpastian waktu pelaksanaan survei lapangan masih menjadi kendala yang berpotensi menghambat efisiensi pelayanan serta menunda pemanfaatan modal produktif oleh penerima pembiayaan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian ekonomi UMKM di perdesaan Aceh Timur memerlukan transformasi pengelolaan KUR yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada optimalisasi tata kelola, penguatan literasi keuangan syariah, pendampingan usaha, dan evaluasi pemanfaatan dana secara berkesinambungan. Implikasi penelitian ini menempatkan perbankan, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait sebagai aktor kolaboratif dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas adaptif pelaku usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kebermanfaatan.

Referensi

- Alfian, Nurzaman, & Alfian, Tijani, I. M., Hassan, R., & Ab. Nasir, W. A. S. (2020). Shariah governance for Islamic microfinance industry (Tadbir urus bagi industri kewangan mikro Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Bai'*. <https://doi.org/10.31436/JIA.V17I2.957>
- Azizi, A. Q., & Mugiyati, M. (2025). Financing Management Paradigm in Islamic Commercial Banks: A Theoretical and Practical Review. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(3), 56–68. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i3.453>
- Cahyani, R. I., & Mu'arrifin, S. F. A. (2024). Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 63–68. <https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.981>
- Fitriyanti, E., & Wulandari, A. (2025). Efficiency and economies of scale in the Indonesian halal food MSMEs: Evidence from Pangkalpinang City. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(2), 680–696. <https://doi.org/10.22373/share.28631>
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Jaenab, J., Huda, N., Qomar, A., Karina, K., Al Farizin, R., & Ayuningsih, N. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dan Sosialisasi Koperasi Merah Putih Untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(4), 179-184.
- Khairunnisa, A., syam'ani, M., widyaningsi, R. putri, Rahma, A. T., & Nursalim, E. (2025). Transformation Towards a Sharia-Based Economy: Theory, Practice and Social Implications. *Deleted Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.24>
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Maknuni, J., & Husna, I. (2026). Pengaruh Pendidikan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM melalui Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Aktual Pendidikan Indonesia*, 5 (1). DOI: <https://journal.ypmma.org/api/article/view/509>
- Nadia, N., Susanti, W. K., Muda, I., Soemitra, A., & Yusrizal, Y. (2025). Determinasi pembiayaan modal kerja usaha mikro kecil dan menengah pada perbankan syariah di Indonesia. *JEBMA*. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6178>
- Ningrum, E. M., & Tambunan, K. (2025). Analisis Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian Cabang Mandala. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(02), 170-175.
- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan penggunaan software spss dalam pengolahan regresi linear berganda untuk mahasiswa fakultas ekonomi universitas simalungun di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 202-208.
- Ratnawita, R., Nurdiani, T. W., Judijanto, L., & Fali, I. M. (2023). Development of Sharia-based financial products and microfinance in Islamic economy. *World Scientific Journal of Economic & Entrepreneurship*, 1(2). <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i02.265>
- Safrina, (2023) Penyaluran KUR di Aceh Tembus Rp3,52 Triliun <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/penyaluran-kur-di-aceh-tembus-rp3-52-triliun>
- Saniaturohmah, S., Garis, R. R., & Nursetiawan, I. (2026). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 5(2), 290-304.
- Setiawan, A. (2025). Penelitian metode campuran (mixed method). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1484-1491.

- Sholeha, A., Nurafifah, A., & Misra, I. (2025). Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan UMKM untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 18-41.
- Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Islam*, 2(2), 91-101.

How Cites

Aziz, A. ., Ismail, & Jamil, M., Muliana. (2026). Pengaruh Pengelolaan Dana KUR Berbasis Syariah di Bank terhadap Kemandirian Ekonomi UMKM di Pedesaan Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 48-57. <https://doi.org/10.58477/ebima.v5i1.537>

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.